

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kemiskinan ialah salah satu dasar-dasar di pusat tahun yang tercatat di pemerintah di negara mana pun. Kemiskinan adalah deskripsi kehidupan banyak negara berkembang termasuk lebih dari satu miliar warga dunia. Kemiskinan adalah masalah yang disebabkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan meningkatnya ketergantungan antar negara, tidak hanya membentuk tantangan dan kemampuan untuk tumbuh secara ekonomi dan membangun suatu negara, tetapi juga mengandung risiko dan ketidakpastian masa depan ekonomi dunia. (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210531125154-37-249513/ini-kunci-masa-depan-ekonomi-dunia-versi-jokowi>)

Kemiskinan (*poverty*) masih menjadi salah satu fenomena sosial yang selalu ada di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang kompleks dan bersifat multidimensional berwajah banyak dan akan terus menjadi persoalan dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan (Renggapratiwi, 2019).

Tingkat Kemiskinan merupakan prosentase jumlah (angka) Kemiskinan terhadap penduduk yang tidak terpenuhi dalam kebutuhan dasar ,

kemiskinan telah membatasi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagaimana manusia untuk memperoleh akses kebutuhan hidup.

Masalah kemiskinan memiliki banyak dimensi seperti halnya dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dimensi sosial berhubungan dengan stratifikasi sosial atau perbedaan lapisan masyarakat antara yang kaya dan miskin, sedangkan dimensi ekonomi berhubungan dengan pendapatan individu dan perekonomian suatu Negara. Menurut Badan Pusat Statistik (2020:13) kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan atau yang bukan makanan, dapat diukur dari segi pengeluaran. Ada beberapa penyebab kemiskinan menurut jenisnya yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang disebabkan karena struktur yang membuat sebagian kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana tentang ekonomi, social, politik, dan juga budaya. Kemiskinan kultural terindikasi dalam perilaku hidup boros, tingkat tabungan rendah, serta adanya sikap menerima atau pasrah terhadap lingkungan kemiskinan. Di Indonesia tidak hanya sedikit penduduk miskin yang disebabkan oleh budaya mereka sendiri, sehingga hal ini menyebabkan setiap tahun tingkat penduduk miskin cenderung naik.

Kemiskinan sebagai taraf hidup yang rendah, adanya tingkat keterasingan di antara sejumlah atau sekelompok orang dibandingkan dengan rendahnya taraf hidup tersebut, yang secara langsung mempengaruhi tingkat kesehatan, moral dan harga diri salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan salah satu penyebab kemiskinan kemiskinan yaitu kurangnya pendapatan dan kemampuan (*lack of income and wealth*)

untuk memenuhi Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*Acceptable*) definisi kemiskinan menurut Suparlan (2017:31). Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja, dan mereka yang tergolong miskin (*the poor*), umumnya menganggur (*unemployed*), dan tingkat pendidikan serta kesehatan mereka umumnya tidak memadai. masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara tegas berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, artinya pendekatan yang digunakan harus transversal, transversal dan secara terpadu, terkoordinasi dan terpadu.

Negara-negara berkembang yang pada umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dan sifat masyarakat tradisional dengan keadaan ekonomi terbelakang, menuju ke arah keadaan yang dianggap lebih mampu dan lebih baik. Paling sedikit apabila hal ini menyangkut ekonomi, ditujukan ke arah mendapatkan kesejahteraan dan tingkat ekonomi yang lebih baik. Perencanaan Pembangunan adalah usaha untuk menunjang perubahan dan kemajuan ekonomi dan membantu kesempatan lebih besar untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dengan melihat pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik

berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa dengan urutan nomor 1 (satu) jika dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik). Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di DIY memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan mengalami pola yang menurun.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi DIY. Menurut Bappeda DIY (2018:16), upaya penanggulangan kemiskinan di DIY dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut "*Grand Strategy*". Pertama, perluasan kesempatan kerja yang ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat

miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan perlindungan social untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi diatas.

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu masalah pengupahan, dengan adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan oleh keterampilan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pelatihan dan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, jika faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun (Soerya, 2019:11).

Tingkat Upah minimum Provinsi dijadikan sebagai dasar dalam penetapan upah minimum Kota/Kabupaten yang belum bisa menetapkan

daerahnya. Upah minimum di Provinsi DIY dalam sepuluh tahun terakhir selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Walaupun ditiaptahunnya mengalami kenaikan, namun adanya ketentuan kenaikan nilai upah minimum ini tetap saja jumlahnya harus diatas kebutuhan hidup layak masyarakat, artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih berkisar di atas julah upah minimum.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2019:11). Menurut teori Lewis tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukkan bagi Negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja, Lewis beranggapan bahwa di Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi sangat terbatas (Sukirno, 2019:9). Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, standard hidup yang rendah dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah. Tingkat pengangguran di DIY cenderung menurun. Walaupun mengalami penurunan, adanya pengangguran harus segera diatasi oleh pemerintah sebelum bertambah serius dan berakibat pada peningkatan

jumlah kemiskinan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan ialah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas penduduk serta peningkatan sumberdaya pangan akan menjadikan kemiskinan semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Lincoln akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan yang baru sangat terbatas (Arsyad,2020:10).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah setingkat provinsi yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah administrasi DIY mencapai 3.185,80 km², atau 0,17 persen dari seluruh wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara astronomis, wilayah DIY terletak pada posisi 7^o .33'- 80.12' Lintang Selatan dan 110^o .00'-110^o .50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya sisi selatan. Seluruh wilayah daratan DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Purworejo di sisi barat, Kabupaten Magelang dan Boyolali di sisi utara; serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri di sisi timur. Wilayah selatan DIY berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. (Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018) Penduduk DIY tercatat sebanyak 3.970.202 jiwa

(BPS, 2021) dengan tingkat kepadatan sebesar 1.078 jiwa / km². Penduduk Yogyakarta mayoritas adalah suku Jawa sebanyak 97%, Sunda 1%, lain-lain 2% (Menurut Indonesia's Population, Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape, Institute Southeast Asian Studies 2019).

Pengertian Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk yang asalnya dari daerah pedesaan menuju ke wilayah perkotaan atau kota besar dengan tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Adapun pengertian urbanisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, adalah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan).

Tabel Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035

Provinsi	2010	2015	2020	Tahun 2025	2030	2035
DKI Jakarta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jawa Barat	65,7	72,9	78,7	83,1	86,6	89,3
Jawa Tengah	45,7	48,4	51,3	54,3	57,5	60,8
DI Yogyakarta	66,4	70,5	74,6	78,0	81,3	84,1
Jawa Timur	47,6	51,1	54,7	58,6	62,6	66,7
Banten	67,0	67,7	69,9	73,7	78,8	84,9

Berdasarkan table diatas tingkat urbanisasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 66,4% dan pada tahun 2015 sebesar 70,5% pada tahun 2020 sebesar 74,6%, menurut BPS nilai urbanisasi ini akan terus meningkat sampai tahun 2035 yang artinya banyaknya perpindahan penduduk dari desa/kota ke kota lainnya. Ada banyak factor

yang menyebabkan terjadinya tingginya tingkat urbanisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapatkan penghasilan serta memiliki upah yang lebih tinggi. Penyebab tingkat kemiskinan di Provinsi DIY ini meningkat diantaranya ialah banyaknya penduduk asli DIY yang berpindah ke kota atau provinsi lain, walaupun terdapat banyaknya tempat wisata akan tetapi para pekerjanya rata rata dari luar daerah DIY sedangkan para penduduk asli DIY berpindah tempat dan mencari pekerjaan di luar DIY itu sendiri, lalu factor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan itu tinggi karena tidak ada sawah dan perairan yang menjadi sumber kehidupan penduduk disekitar DIY, serta yang belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian.

Jika dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh komponen investasi. Kinerja investasi mulai mencatatkan capaian positif yang sejalan dengan pembangunan proyek *multiyear* yang terus dilaksanakan, seperti pembangunan jembatan pada JJLS dan pembangunan Tol Jogja –Solo, dan peningkatan investasi non bangunan pada triwulan laporan. Selain itu, komponen konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pembentuk PDRB DIY kembali melanjutkan tren perbaikan sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat di triwulan laporan dan perbaikan penghasilan karena peningkatan UMR.

Berdasarkan latar belakang diatas, Provinsi DIY dalam periode 2010-

2021 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di pulau Jawa adalah yang paling tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Tingkat Pendidikan penduduk terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis sebagai syarat memperoleh gelar S1 Program studi Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.